



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER**

NOMOR AKREDITASI ; YM.00.03.3.5.3974

Jl. Let.Jend. Soeprapto No.31 Telanaipura – Jambi 36122

Telp. (0741) 61692, 61694,63391,62354 Fax. (0741) 60014

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI**  
**NOMOR: 177 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGORGANISASIAN REKAM MEDIS**

**DIREKTUR UTAMA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, RSUD Raden Mattaher Jambi harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu RSUD Raden Mattaher Jambi harus mempunyai buku pedoman pengorganisasian Rekam Medis;
  - c. bahwa untuk mencukupi sebagaimana dimaksud pada poin a dan b maka pedoman pengorganisasian rekam medis perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
7. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :
- KESATU : PEDOMAN PENGORGANISASIAN REKAM MEDIS
- KEDUA : Pedoman Pengorganisasian Rekam Medis yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi

Pada tanggal : 26 Maret 2018

**Plt. Direktur Utama,**



**Drg. Iwan Hendrawan**  
**Pembina TK.I**  
**NIP. 19740729 200604 1 010**

